

**STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN RI**

SKRIPSI

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum UPN “ Veteran ” Jawa Timur.



Oleh:

NOURMA DWI WULANDARI

NPM: 0871010048

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan rasa puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Untuk mendapatkan Gelar S1 Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, kesempatan, sarana dan prasarananya kepada penulis selama melaksanakan penulisan skripsi. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang memiliki empati terhadap kondisi penulis .
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Soekarno., MS selaku Wadek II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Panggung Handoko, SH, S.Sos, MM., selaku Kaprogdi Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan selaku dosen wali penulis yang selama ini memberikan motivasi serta masukan-masukan.

5. Bapak Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf-staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Kedua orang tua, Drs. R. Ibnu Suprijanto dan Siti Martaniati yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
9. Kakak Tercinta Prihandani Cahyadi dan Rochmad Prehantono serta Saudara-saudara yang telah memberikan dukungan dan doanya.
10. Kekasih tercinta Hermanto yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
11. Teman-teman yang memberikan masukan serta motivasi dalam pembuatan proposal ini.
12. Sahabat-sahabatku (Margaretha Yolan, Sri Endang, Dewa Ayu, Nyoman Ari, Iwan Bogianto, Donny Tri, Pranitha Septi) yang selalu setia dalam menjalin persahabatan kita dan memberikan dukungan buatku dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dalam proses penulisan yang akan datang bisa menjadi lebih baik.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi pembaca, selain itu memberikan tambahan ilmu yang nantinya bisa berguna dalam kehidupan masyarakat. Amin...

Surabaya, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.5 Kajian Pustaka | |
| 1.5.1 Pengertian tentang Perkawinan..... | 6 |
| 1.5.2 Syarat-syarat Perkawinan..... | 10 |
| 1.5.3 Tata Cara Perkawinan..... | 12 |
| 1.5.4 Pengertian tentang Perkawinan Campuran..... | 12 |
| 1.5.5 Tata Cara Perkawinan Campuran..... | 15 |
| 1.5.6 Hubungan Orang Tua dan Anak..... | 16 |
| 1.5.7 Pengertian tentang Kewarganegaraan..... | 17 |
| 1.5.8 Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang- undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006..... | 20 |
| 1.5.9 Dasar Munculnya Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan..... | 21 |

| | |
|--|----|
| 1.5.10 Tinjauan Umum Tentang Anak..... | 23 |
| 1.5.11 Status Hukum dan Kedudukan Warga Negara Dalam Negara... | 26 |
| 1.6 Metodologi Penelitian | |
| 1.6.1 Jenis Penelitian..... | 28 |
| 1.6.2 Sumber Data..... | 29 |
| 1.6.3 Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| 1.6.4 Metode Analisis Data..... | 32 |
| 1.6.5 Sistematika Penulisan..... | 33 |
| BAB II STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU No.12 TAHUN 2006 | |
| 2.1 Perbedaan Status Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran... | 36 |
| 2.2 Status Kewarganegaraan Ganda Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran..... | 42 |
| 2.2.1 Penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda..... | 44 |
| 2.2.2 Akibat Hukum Apabila Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda..... | 46 |
| 2.2.3 Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan Untuk Memperoleh Fasilitas Sebagai Warga Negara Indonesia Yang Berwarganegaraan Ganda..... | 46 |

| | | |
|----------------|--|----|
| BAB III | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG TIDAK TERCATAT | |
| 3.1 | Anak yang Sah Menurut Hukum..... | 48 |
| 3.2 | Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Tidak Tercatat dan Perlindungan Hukumnya..... | 51 |
| 3.2.1 | Persyaratan Pencatatan Kelahiran Orang Asing di Indonesia..... | 54 |
| 3.2.2 | Persyaratan Pelaporan Akta Kelahiran Orang Asing di Indonesia..... | 55 |
| 3.3 | Pelaporan Perkawinan Campuran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil..... | 55 |
| 3.3.1 | Persyaratan Pelaporan Perkawinan Campuran WNI di Luar Negeri Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil... | 58 |
| 3.3.2 | Persyaratan Pencatatan Perkawinan WNA yang Melakukan Perkawinan di Indonesia..... | 59 |

BAB IV. PENUTUP

| | | |
|-----|-----------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan..... | 61 |
| 4.2 | Saran..... | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nourma Dwi Wulandari
NPM : 0871010048
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Maret 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN RI

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari perkawinan campuran yang mempengaruhi status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran itu sendiri serta mengetahui anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Sumber data di peroleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah atau jurnal, dan perundang-undangan yang berlaku, serta dari hasil Wawancara dengan Kasubag Perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Analisis data menggunakan analisis yuridis normatif yang hakikatnya mengutamakan mempergunakan bahan-bahan kepustakaannya sebagai sumber data penelitiannya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa status kedudukan anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas karena berlakunya Undang-undang No.12 Tahun 2006, namun kewarganegaraan ganda terbatas dapat terjadi dengan adanya suatu pengecualian dalam Pasal-pasal tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini, sehingga anak tersebut dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas. Bagi anak hasil perkawinan campuran yang lahir di luar negeri pada saat kembali ke Indonesia, orang tuanya wajib melaporkan serta mencatatkan kelahiran anaknya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerahnya.

Kata Kunci : Status dan Kedudukan Anak, Perkawinan Campuran, Undang-undang
12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nourma Dwi Wulandari

Tempat/Tgl Lahir : 15 Maret 1990

NPM : 0871010048

Konsentarsi : Perdata

Alamat : Jl. Pandugo Praja (Perumda) II/No.5 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “ STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
A.n. Ketua Program Studi
Sesprogdi

Surabaya, 13 Januari 2012
Penulis

(Fauzul Aliwarman., SH., M.Hum)
Npt. 3 8202 07 0221

(Nourma Dwi Wulandari)
0871010048

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat, ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan

lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan campuran telah, merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini dijalankan dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi Negara Indonesia ternyata membawa imbas kepada perubahan dalam berbagai hal. Diantaranya adalah adanya perubahan UU No 62 Tahun 1958 menjadi UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Perubahan tersebut juga mendasari adanya perubahan aturan dalam Keimigrasian Indonesia. Fenomena ini merupakan fenomena yang harus disikapi bersama oleh banyak kalangan. Perubahan ini tentu akan membawa dampak positif atau negatif terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Untuk menghindari hal itu, agar semua komponen aktif mengamati bahkan menilai perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun baiknya, UU kalau memang belum diketahui dan dipahami seluruh warga negara, maka akan membawa dampak tersendiri, terutama pada hubungan antara Indonesia dengan Negara lain. Kalau ditinjau dari hubungan antar wilayah, tentu bervariasi. Karena bagaimana pun juga, setiap wilayah akan memberikan tanggapan berbeda dengan pemberlakuan UU No.12 Tahun 2006. Dalam konsep sosialisasi, terdapat beberapa komponen yang mengalami reaksi terhadap perubahan pemberlakuan Undang-undang tersebut. Pertama, adalah masyarakat sendiri, di mana aturan yang

terlalu ketat akan mempengaruhi sistem kependudukan di wilayah tersebut. Warga Negara Indonesia yang sudah melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing. Dengan terjadinya perubahan ini, maka secara pribadi mereka tentu akan kembali melakukan koordinasi dengan negara asalnya. Dan ada kemungkinan, penerimaan mereka pun akan semakin kurang bersahabat. Langkah yang harus diambil, adalah lebih cepat melakukan koordinasi dengan negara sahabat serta negara yang kebanyakan warga negaranya telah membaaur menjadi warga negara Indonesia atau masih belum masuk menjadi Warga Negara Indonesia. Ini merupakan suatu tantangan untuk melaksanakan misinya merubah aturan lama. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya warga negara Indonesia yang memegang kewarganegaraan ganda. Dan tidak tertutup kemungkinan mereka akan lebih mudah melakukan kejahatan dan melarikan diri ke negara milik salah satu pasangan. Selain itu proses penanganan keimigrasian pun akan semakin kurang efektif. Karena semakin ketat aturannya, biasanya diikuti oleh birokrasi yang semakin panjang. Dan ini akan menyebabkan keresahan bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda. Seperti masalah Manohara yang memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu sebagai Warga Negara Indonesia dan kewarganegaraan Amerika. Dikarenakan orang tuanya berwarganegaraan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Ini sungguh memprihatinkan, yang berkaitan dengan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan campuran, mengingat dengan diberlakukannya Undang-undang No.12 tahun 2006 tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang berbeda dengan Undang-

Undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan dari suatu perkawinan campuran.

Perkawinan Campuran dalam perundang-undangan di Indonesia, didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah, perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia." Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu, Undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya Undang-Undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.¹

¹ Pan Mohammadd Faiz,., Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia

Anak, adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena Undang-undang baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran.

2. Praktis.

Sebagai wawasan terhadap tata cara dalam melakukan status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran menurut UU No.12 Tahun 2006 serta mengetahui perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam masyarakat dalam mendapatkan keturunan. Yang dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Subekti mengartikan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²

Sementara menurut Dr. Wirjono menyatakan perkawinan adalah Hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perkawinan.³

Perkawinan juga dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:
 - a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
 - b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.
2. Segi Sosial dari suatu perkawinan.
 Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.
3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.⁴

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-

² Subekti., Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 1985, hal 23

³ Soedharyo Soimin., Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal 3

⁴ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2009, hal 47

prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2. Sahnya Perkawinan.

Suatu perkawinan dalam Undang-Undang ini dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tersebut, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Asas Monogami

Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat

beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4. Prinsip Perkawinan

Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

5. Mempersulit Terjadinya Perceraian

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6. Hak dan Kedudukan Isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Jaminan Kepastian Hukum

Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini tidak mengatur, dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

1.5.2 Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan secara sah dapat dilangsungkan, dengan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mendapat umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) yaitu:

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki berusia 18 tahun dan untuk seorang perempuan berusia 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak
3. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak
5. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.⁵

⁵ Ibid, Hal 23

1.5.3 Tata Cara Perkawinan

Tata cara pelaksanaan perkawinan ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 11

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Disamping itu se usai dilangsungkannya perkawinan, kemudian dilaksanakan penandatanganan akta perkawinan sesuai peraturan sehingga urutannya sebagai berikut:

1. Kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnyaditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, ditandatangani pula oleh wali nikah yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

1.5.4 Pengertian Tentang Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspratiat kaya dan orang Indonesia. Untuk memecahkan masalah perkawinan campuran, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan

peraturan tentang perkawinan campuran yakni *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No.158 Tahun 1958).

Menurut Pasal 1 RGH, perkawinan campuran ialah perkawinan antara "orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan", yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan orang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 (2) ISR (*Indonesische Staatsregeling*).⁶

Pasal 2 RGH menyebutkan dengan tegas mengenai status seorang perempuan dalam perkawinan campuran, yaitu selama pernikahan belum putus, seorang istri tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil. Pasal 10 RGH mengatur tentang perkawinan campuran di luar negeri, di antaranya mengatur perkawinan campuran antar bangsa / antar negara, antara lain yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Peraturan RGH S.1898 nomor. 158 tersebut berdasarkan Pasal 66 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 (1) dikatakan "Yang menjadi

⁶ H. Hilman Hadikusuma., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal 12

warga negara ialah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara”.⁷

Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU No.1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran antara warga negara yang berbeda, misalnya antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan Republik Indonesia Cina, atau perkawinan antara warga Indonesia dengan warga negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran, yaitu :

- a. Perkawinan antar kewarganegaraan, Pengertian Perkawinan Campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Pasal 57 ini membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI.
- b. Perkawinan antar adat, Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat

⁷ Ibid, hal 13

hukum suami dan isteri yang adat, ialah ‘perkawinan antara adat’, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah asal atau suku bangsanya berlainan.⁸

- c. Perkawinan antar agama, Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga.⁹

1.5.5 Tata Cara Perkawinan Campuran

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

1. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
2. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing

⁸ Ibid, hal 15

⁹ Ibid, hal 17

berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
4. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
5. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
6. Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.

1.5.6 Hubungan Orang Tua dan Anak

Hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan harus mendapat perhatian khusus. Apalagi hubungan antara orang tua dan anak sebagai hasil perkawinan campuran. Hal yang perlu diperhatikan adalah masalah kewarganegaraan anaknya. Apakah anak tersebut akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Sepanjang tidak ada perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga, tidak akan menimbulkan banyak masalah. Namun, ketika terdapat perbedaan kewarganegaraan, maka hal ini akan menimbulkan masalah.

Orang tua mempunyai kekuasaan tertentu atas anaknya. Kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sebaik mungkin sampai anak tersebut kawin atau dianggap dapat berdiri sendiri. Begitu pula sebaliknya, anak harus menghormati dan mentaati kehendak orang tuanya. Orang tua juga wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Bila terdapat perbedaan kewarganegaraan antara orang tua dan anaknya maka harus dilakukan pemilihan mengenai hukum yang menentukan status kewarganegaraan mereka. Menurut Undang- Undang No.62 tahun 1958, status kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan bapaknya. Seorang anak yang ayahnya adalah Warga Negara Indonesia maka anak tersebut akan menjadi WNI. Namun sebaliknya, bila anak tersebut memiliki ayah yang WNA maka anak tersebut akan mengikuti status kewarganegaraan bapaknya.

Masalah kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 11 dan 12 Stb. 1898/158. Pasal 11 menyatakan bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti kedudukan hukum bapaknya. Keadaan demikian bahkan tidak dapat dipertikaikan, walaupun surat nikah ayah ibu mereka ada kekurangan syarat-syarat atau bahkan dalam hal tidak adanya surat nikah tersebut pun kedudukan anak itu tidak dapat dipertikaikan asalkan pada lahirnya kedua orang tua mereka itu secara terang hidup sebagai suami istri (Pasal 12).

Hubungan orang tua dan anak ini termasuk dalam bidang *onderlijke macht* atau kekuasaan orang tua. Di Indonesia, hubungan kedua orang tua dan anak ditentukan oleh hukum sang ayah.

1.5.7 Pengertian tentang Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara

menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. status kewarganegaraan akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negeranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya.

Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran di kenal dua asas yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli artinya berasal dari kata solum yang artinya negeri atau tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah.

a. Asas Ius Soli

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.¹⁰

Kewarganegaraan dapat diistilahkan sebagai citizenship yang memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Menurut penjelasan dari Pasal 2 Peraturan Penutup UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan RI, Kewarganegaraan diartikan “ Segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Pengertian kewarganegaraan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Kewarganegaraan dalam Arti Yuridis dan Sosiologis

- 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

b. Kewarganegaraan dalam Arti Formil dan Materiil

- 1) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
- 2) Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.¹¹

¹⁰ Winarno., Pendidikan Kewarganegaraan., Jakarta., Bumi Aksara., 2008., hal 50

¹¹ Ibid, hal 49

1.5.8 Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang- Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006

Indonesia sebelum adanya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, berpedoman kepada Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 adalah mengenai ketentuan-ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau Pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing.

Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya UU NO. 62 Tahun 1958 menganut asas ius sanguinis seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak

lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.

2. Pasal 1 huruf c Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan dalam 3000 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.
3. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan).
4. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan).

1.5.9 Dasar Munculnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Di negara kita ini banyak warga keturunan yang mengalami hal yang pahit pada masa berlakunya Undang-Undang No.62 Tahun 1958. Banyak

penderitaan yang terjadi atas perlakuan yang diskriminatif, baik dalam pelayanan status yang berbelit-belit dan lama, bahkan dengan biaya besar harus ditinggalkan. Oleh karena itu telah lahir Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan lahirnya atau munculnya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 ini, masyarakat berharap tercapainya perlindungan hukum dengan prinsip kesamaan hak bagi seluruh warga negara indonesia, tanpa membedakan dalam kedudukan hukum dan pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2006, Indonesia menganut azas-azas kewarganegaraan adalah sebagai berikut:¹²

1. Azas Ius sanguinis (law of the bold) adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada keturunan.
2. Azas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas artinya azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Azas kewarganegaraan tunggal adalah azas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Azas kewarganegaraan ganda terbatas adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-nak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Undang-undang ini pada dasarnya tidak menganut kewarganegaraan ganda (bipratide) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride).

¹² Herlin Wijayati., Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Bayumedia, Malang, 2010, hal 93

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-undang ini merupakan suatu pengecualian.

Bipratide adalah Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Apatride adalah Seseorang yang karena berbagai hal tidak memiliki kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan.¹³

1.5.10 Tinjauan Umum Tentang Anak

Definisi anak menurut Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

¹³ Dzulkikifli Umar, dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Quantum Media, 2010

Karena itu orang-orang yang di dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang lalu dinyatakan tak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidak cakapan orang-orang yang belum dewasa.

Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang belum dewasa yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum serta dapat batal demi hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran terlihat jelas bahwa ayah dan ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda, yang sehingga tunduk pada dua yuridiksi hukum yang berbeda pula.

Pada saat ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran tidak lagi secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tetapi anak tersebut dapat menjadi WNI. Hal itu karena UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI menganut asas terjadinya peristiwa di mana anak tersebut di lahirkan, maka ia menjadi WNI yang mempunyai kewarganegaraan terbatas, maksudnya setelah anak berusia delapan belas tahun dia berhak

menentukan atau memilih kewarganegaraanya dengan mengajukan permohonan kepada presiden melalui Menteri Kehakiman dan HAM.¹⁴

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Dalam teori HPI (Hukum Perdata Internasional) berkembang tiga pandangan tentang cara penyelesaian persoalan pendahuluan, yaitu:¹⁵

1. Absorption

Prinsipnya, melalui absorption, *lex cause* yang dicari dan ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI untuk mengatur masalah pokok (main issue) akan digunakan juga untuk menjawab “persoalan pendahuluan”. Jadi, setelah *lex cause* untuk masalah pokok ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI *lex fori*, masalah pendahuluannya akan ditundukkan pada *lex cause* yang sama. Cara ini adakalanya disebut cara penyelesaian berdasarkan *lex cause*.

Kualifikasi serta penentuan kaidah hukum inter apa yang harus digunakan untuk memutus masalah pendahuluannya akan bergantung pada *lex causae* yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah pokok.

2. Repartition

Pada dasarnya, melalui repartition, hakim harus menetapkan *lex cause* untuk masalah pendahuluan secara khusus dan tidak perlu menetapkan *lex cause* dari masalah pokoknya terlebih dahulu. Dengan mengabaikan sistem hukum mana yang akan merupakan *lex cause* untuk menjawab masalah pokok, hakim akan melakukan kualifikasi berdasarkan *lex fori* dan

¹⁴ Rika Saraswati., Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 53

¹⁵ Bayu Seto H., Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional., Citra Aditya Bakti., Bandung, 2006, hal 144

menggunakan kaidah-kaidah HPI-nya yang relevan khusus untuk menetapkan *lex cause* dari masalah pendahuluan. Cara ini disebut penyelesaian dengan *lex fori*.

3. Pendekatan Kasus demi Kasus

Ada pandangan yang berpendapat bahwa penetapan *lex cause* untuk masalah pendahuluan atau incidental question harus dilakukan dengan pendekatan *kasuistis*, dengan memperhatikan sifat dan hakikat perkara atau kebijakan dan kepentingan forum yang mengadili perkara.

1.5.11 Status Hukum dan Kedudukan Warga Negara Dalam Negara

Status Hukum seseorang menentukan tempat tinggalnya sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban menurut hukum. Status hukum seseorang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah sebagai penduduk di desa atau kelurahan tempat tinggalnya. Tempat tinggal seorang istri mengikuti tempat tinggal suaminya apabila suami istri adalah warga Negara dari Negara yang sama. Hak dan Kewajiban hukum istri terikat pada tempat kediaman suaminya. Jika suami istri berbeda warga Negara, hak dan kewajiban hukum suami atau istri terikat dengan tempat tinggal di Negara masing-masing, kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁶

Sebagai anggota dari Negara, warga Negara memiliki ikatan dengan Negara. Hubungan antara Warga Negara dengan Negara terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap Negara. Sebaliknya, Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warganya. Hubungan dan kedudukan warga Negara ini bersifat

¹⁶ Prof. Abdulkadir Muhammad., SH., Hukum Perdata Indonesia., Citra Aditya Bakti., Bandung., 2010., hal 33

khusus, sebab hanya mereka yang menjadi warga negaralah yang memiliki hubungan timbale balik dengan negaranya. Orang-orang yang tinggal di wilayah Negara, tetapi bukan warga Negara dari Negara itu tidak memiliki hubungan timbal balik dengan Negara tersebut.¹⁷

1.6 Metodologi Penelitian

Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penulis mengemukakan istilah “metodologi”, berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:¹⁸

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metodologi dapat diartikan juga sebagai Logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode Penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. untuk membuat metode penelitian tersebut, terdapat empat pokok yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

¹⁷ Ibid., hal 50

¹⁸ Soerjono Soekanto., Pengantar Penelitian Hukum., Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hal 5

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Data dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Tujuan dalam sebuah penelitian hanya memerlukan satu tujuan umum, ada juga yang mempunyai beberapa tujuan yang sesuai dengan permasalahan atau subpermasalahan. Tujuan penelitian ini harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.

Kegunaan dalam sebuah penelitian adalah suatu bentuk yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa

melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.¹⁹

Penelitian hukum normatif ini mencakup Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.²⁰

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan masalah status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran dan mengenai masalah perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat, yang diatur dengan Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Kewarganegaraan.

1.6.2 Sumber Data

Karena penulisan proposal skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder. Data sekunder itu sendiri artinya yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²¹ data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. yaitu dapat berupa sebagai berikut :

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 163

²⁰ Ibid, hal 55

²¹ Ibid., hal 31

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1. UUNo.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
5. PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. bahan hukum sekunder ini sifat nya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum untuk memperluas wawasan penyusun mengenai terdiri dari :

1. H. M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia,
2. H. Hilman Hadikusuma., Hukum Perkawinan Indonesia,
3. Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian
4. R. Soetojo Prawirohamidjodjo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga
5. Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia

c. Bahan hukum tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

1. Lukman Ali, Kamus Besar Indonesia
2. John M. Echolas dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia
3. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer
4. Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan wawancara, adapun maksudnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur-literatur hukum, internet, undang-undang, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²²

Adapun prakteknya nanti penulis akan melakukan wawancara langsung dengan Kepala sub bagian perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk memperoleh keterangan masalah status dan kedudukan anak dalam perkawinan campuran serta perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pengolahan data yaitu bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya.²³ Analisa data yaitu bentuk analisis yang bagaimana dalam menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang direncanakan dalam penelitian.²⁴

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung padajenis datanya, karena jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hokum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan setiap pemilihan metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik.

²² Ibid, hal 82

²³ Soejono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 46

²⁴ Ibid, hal 47

Hermeneutik atau penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normative terutama mempergunakan bahan-bahan keputusannya sebagai sumber data penelitiannya.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan skripsi terbagi menjadi empat sub bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang yang berisi argumentasi penulis terhadap judul yang ada, rumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penulis berisi tujuan dari penyusunan dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian. Sub bab kedua berisi kajian pustaka yang merupakan uraian teoritis tentang teori dasar yang digunakan sebagai analisa

pemecahan hukum yang diteliti. Sub bab ketiga berisi metode penelitian yang berupa cara melakukan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, penarikan kesimpulan selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

Bab kedua ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Status dan kedudukan anak dalam perkawinan campuran menurut UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Dalam bab kedua ini penulis akan menjelaskan dalam dua sub bab yang terdiri dari: Perbedaan Status Kedudukan Anak Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan Ganda Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran.

Bab ketiga ini menguraikan perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai perkawinan campuran yang berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran yang tidak tercatat dan terbagi dalam tiga sub bab yang terdiri dari: Anak Sah Menurut Hukum, Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Tidak Tercatat dan Perlindungan Hukumnya, Pelaporan Perkawinan Campuran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bab keempat merupakan penutup. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan yang ada. Dengan demikian bab penutup ini merupakan

rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.